

ALTERNATIF DISPUTE RESOLUTION (ADR)
PENYELESAIAN SENGKETAPENCEMARAN LINGKUNGAN
(Studi Kasus di Kelurahan Wonoyoso Kabupaten Pekalongan)



Diajukan Kepada
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
Untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister dalam Ilmu Hukum

Oleh :

M. HAMDI

R.100040042

PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2016

HALAMAN PERSETUJUAN

ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR)

PENYELESAIAN SENGKETA PENCEMARAN LINGKUNGAN

(Studi Kasus diKelurahan Wonoyoso Kabupaten Pekalongan)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

M.HAMDI

R. 100040042

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke Ujian tesis

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

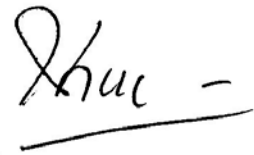
Menyetujui

Pembimbing I



Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati

Pembimbing II



Prof. Dr. Absori S.H., M. Hum

HALAMAN PENGESAHAN

ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR)

PENYELESAIAN SENGKETA KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN

(Studi Kasus di Kelurahan Wonoyoso Kabupaten Pekalongan)

Oleh :

M. HAMDI

R. 100040042

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Tanggal 19 Desember 2013

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati

(Ketua Dewan Penguji)

2. Prof. Dr. Absori, S.H. M. Hum

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Dr. Natangsa Surbakti, S. H. M. Hum.

(Anggota II Dewan Penguji)

Direktur,



Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. HAMDI

NIM : R. 100040042

Fakultas/ Jurusan : Magister Ilmu Hukum/Progam Pascasarjana

Jenis Penelitian : Skripsi

Judul : ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (SDR) PENYELESAIAN
SENGKETA PENCEMARAN LINGKUNGAN (Studi Kasus di
Kelurahan Wonoyoso Kabupaten Pekalongan)

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti kepada perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi mengembangkan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/ mengalih formatkan,
3. Mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya serta menampilkan dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan UMS, tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta,
4. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan perpustakaan UMS, dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya tulis ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Surakarta, April 2016

Yang Menyatakan



M. Hamdi

ALTERNATIF DISPUTE RESOLUTION
(ADR)PENYELESAIANSENGKETA PENCEMARAN LINGKUNGAN
(Studi Kasus di Kelurahan Wonoyoso Kabupaten Pekalongan)

Oleh :

M. Hamdi

Universitas Muhammadiyah Surakarta

email: hamdi140469@yahoo.com

Abstrak

Pembangunan merupakan upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun kepuasan batin. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sejalan dengan peningkatan kesadaran masyarakat tersebut mendorong munculnya tuntutan agar berbagai aktivitas pembangunan seperti aktivitas industri dapat dijalankan secara lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Namun yang terjadi kadangkala terdapat kecenderungan di mana penanggung jawab industri mengabaikan berbagai persyaratan-persyaratan lingkungan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), pemilikan dan pengoperasian Unit Pengolah Limbah (UPL), dan persyaratan lainnya. Lingkungan sangat potensial menimbulkan perbedaan pandangan, kepentingan atau persepsi di antara para “*stakeholders*”. Manakala pandangan tentang lingkungan hidup masih beranjak dari kepentingan masing-masing, maka sengketa/konflik akan selalu muncul. Untuk mengatasi berbagai permasalahan sengketa lingkungan hidup tersebut, Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Th 2009 telah menentukan bahwa: Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Dalam konsepnya, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan menurut UU. Pasal 85 ayat 3 No.32 Tahun 2009 dapat ditempuh melalui mediasi dan arbitrase. Sebagai pelaksana kedua undang-undang tersebut, untuk mengefektifkan penyelesaian sengketa secara alternatif dilakukan di luar pengadilan. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis yaitu pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan atau norma-norma atau konsep-konsep hukum terutama hukum lingkungan yang mengatur cara-cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sosiologis artinya pendekatan yang didasarkan pada pelaksanaan penyelesaian sengketa dengan cara “mediasi” yang merupakan objek yang akan diteliti. Setelah penulis melakukan penelitian di lapangan, maka telah ditemukan beberapa hal penting, yaitu Pemerintah Daerah KabupatenPekalongan harus segera secara *continue* melakukan sosialisasi UU. No. 32 th 2009, kepada masyarakat Kabupaten Pekalongan, utamanya bagaimana cara-cara menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, dengan biaya murah, cara mudah, tidak berlarut-larut serta dapat menghasilkan keputusan yang sama-sama menang dan langsung dapat menghentikan permasalahan/persengketaan serta terselamatkannya lingkungan hidup secara dini.

Kata Kunci : Lingkungan hidup, Sengketa, pengadilan

ABSTRACT

Development is a conscious effort to cultivate and utilize natural resources to improve the welfare of the people, both to achieve born prosperity and inner satisfaction. Therefore, the use of natural resources must be harmonious and balanced with environmental functions. The increase of public awareness has prompted the emergence of demands so that various activities such as the development of industrial activity can be run in a more environmentally responsible. But sometimes there is a tendency that the person which in charge of the industry ignored the environmental requirements such as the Environmental Impact Assessment (EIA), the ownership and operation of the Waste Processing Unit and other requirements. The environment is potentially make the different opinion, interest or the perception of the "stakeholders". When the views on the environment is still moving from the respective of interests, then the dispute/conflict will always arise. To overcome the problems of environmental disputes, Article 84 paragraph (1) of Law No. 32 year 2009 has determined that: environmental dispute settlement can be reached through the court or out of court. The settlement of environmental disputes out of court according to Law Article 85 paragraph 3 Number 32 in 2009 can be reached through mediation and arbitration. As the executor of the law, to make effective alternative dispute resolution conducted outside the court. The method of this research is a socio-juridical. Juridical is an approach using legislation or norms or legal concepts especially environmental laws that rule the way to settle down the disputes out of court. Sociological is an approach based on the implementation of the settlement of disputes through the mediation. After the author conducted research in the field, it has been discovered some important things, the Local Government of Kabupaten Pekalongan should immediately continue to disseminate the Act No. 32 year 2009 to Pekalongan society, how to resolve the environmental disputes out of court, with a low cost, easy way, do not take so long and can generate win-win solution and can immediately stop the problems/disputes and the environment can be safe.

Keywords: ADR, Dispute, Pekalongan

PENDAHULUAN

Salah satu masalah yang paling krusial yang dihadapi umat manusia saat ini adalah pelestarian lingkungan. Pencemaran lingkungan di sekitar bumi pertiwi sangat mempengaruhi tidak hanya kehidupan manusia tetapi juga seluruh organisme hidup. Masalah lingkungan telah mendapat perhatian dari seluruh dunia seperti yang diakui sebagai bencana di seluruh dunia. Alasan utama dari masalah ini adalah meningkatkan aktivitas manusia dalam masyarakat modern yang telah mempercepat laju pencemaran lingkungan.

Secara global, ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup manusia. Pada kenyataannya, gaya hidup masyarakat industri ditandai oleh pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah berbahaya dan beracun.¹ Hal itu merupakan tantangan yang besar terhadap cara pembuangan yang aman dengan resiko yang kecil terhadap lingkungan hidup, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Menyadari hal tersebut di atas, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu dikelola dengan baik. Serta Polusi industri merupakan penyebab utama degradasi lingkungan yang pada gilirannya merupakan faktor kunci dalam mengubah peristiwa cuaca ekstrim menjadi bencana alam. Degradasi lingkungan tidak hanya mengintensifkan bencana tetapi juga meningkatkan potensi bencana sekunder.² Dari sudut pandang respon terhadap peristiwa mengganggu masyarakat terlihat kepada para pemangku kepentingan, lembaga dan pemerintah. Tesis ini membahas bagaimana hal ini dapat dicapai melalui pembentukan tekanan masyarakat pada unit polusi industri lokal yang diciptakan oleh penyediaan informasi yang sesuai dalam domain publik yang ditafsirkan untuk konsumsi masyarakat dengan elemen masyarakat (*Mediator*). Kedua dengan menggunakan pengetahuan yang berhubungan dengan keselamatan industri dan manajemen risiko untuk memacu pra-bencana tindakan di tingkat masyarakat.

Sebuah ekologi sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui interaksi dinamis antara lingkungan alam dan masyarakat manusia dan untuk model tren jangka panjang dalam dampak lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.³ Saat ini masyarakat yang hidup gaya modern, preferensi dalam hidup, dan sikap terhadap alam tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga kepribadian manusia mendistorsi dan pola nilai. Etika lingkungan hidup adalah cara terbaik untuk melindungi hak

¹*The IUP Journal of Infrastructure*, Vol. IX, No. 2, pp. 34-43, June 2011 The Global Water Crisis: Issues and Solutions Manzoor Kooloth Peedikayil Jr.

² Soemarwoto Otto. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta : Djambatan, 2001.

³*OIDA International Journal of Sustainable Development*, Vol. 5, No. 6, pp. 70-80, 2012
Montclair State University - Department of Earth and Environmental Studies Michael P. Weinstein, Montclair State University - PSEG Institute for Sustainability Studies
George Martin, Montclair State University - Department of Sociology December 18, 2012

asasi manusia dari pencemaran lingkungan. Etika lingkungan yang dibutuhkan untuk memainkan peran utama dalam melestarikan lingkungan. Sejalan dengan peningkatan kesadaran masyarakat tersebut, mendorong munculnya tuntutan agar berbagai aktivitas pembangunan seperti aktivitas industri dapat dijalankan secara lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan, melalui suatu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pelestarian daya dukung lingkungan, sebuah ekologi sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia.⁴ sehingga dampak buruk yang sekiranya muncul dapat diperkirakan, diantisipasi, dikurangi atau bahkan dihilangkan sama sekali.

Namun yang terjadi kadangkala terdapat kecenderungan di mana penanggung jawab industri mengabaikan berbagai persyaratan-persyaratan lingkungan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), pemilikan dan pengoperasian Unit Pengolah Limbah (UPL) dan persyaratan lainnya. Cukup banyak kasus-kasus yang terjadi di mana UPL tidak dioperasikan dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dibuang begitu saja ke media lingkungan.⁵

Di pihak lain, masyarakat yang dirugikan atas tindakan pencemaran lingkungan, tidak mampu mengajukan sendiri kompensasi, baik kompensasi berupa ganti rugi maupun tindakan perbaikan/pemulihan lingkungan, karena alasan ketidaktahuan peraturan perundangan yang akan dijadikan pijakan penuntutan maupun faktor biaya yang bagi mereka masih menjadi keragu-raguan karena dibayangi akan resiko kalah bila menuntut ke Pengadilan.

Beberapa konflik pencemaran air misalnya: Lapindo di Jawa Timur, Kasus Acidatama Chemical Industry (Surakarta), Kasus Bomatex (Ungaran), SEJ (Batang), Kasus Sungai Ciujung (Serang Jawa Barat), Kasus Pabrik Jamur Merang (Klaten), Kasus Perusahaan Laundry Cucian Jeans di Kab. Pekalongan dari kasus terakhir tersebut terjadi di Kabupaten Pekalongan.

⁴*OIDA International Journal of Sustainable Development*, Vol. 5, No. 6, pp. 70-80, 2012⁴
System Dynamic Model Approach for Urban Watershed Sustainability Study

⁵*OIDA International Journal of Pembangunan Berkelanjutan*, Vol. 3, No 8, hlm 101-106, 2012
The Role of Water, Food Security and Poverty Alleviation in the Context of Sustainable Livelihoods

Terjadinya pencemaran air sebagian besar karena tidak adanya atau tidak memadainya unit pengolah limbah. Ketidakpatuhan para penanggung jawab kegiatan yang disebabkan oleh sikap “*eksternalitas negatif*” yaitu keengganan menanggung biaya pengolah limbah.

Pencemaran lingkungan menurut Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, adalah Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup⁶. Selain tindakan pencemaran lingkungan hidup, sebab-sebab lainnya yang dapat menyebabkan timbulnya sengketa adalah perusakan lingkungan hidup yang diartikan sebagai tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Untuk mengatasi berbagai permasalahan sengketa lingkungan hidup tersebut, Pasal 84 ayat 1 dan Pasal 85 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Penyelesaian Sengketa dari salah pihak bisa melalui Pengadilan atau diluar Peradilan.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan pasal 85 ayat 1 No. 32 Tahun 2009 “Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar Peradilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai: (a) Bentuk dan besarnya ganti rugi. (b) tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan. (c) tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya dan pencemaran dan/atau perusakan. (d) tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.”⁷

Dalam konsepnya, penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dapat ditempuh beberapa cara yaitu : Negoisasi, mediasi, dan Arbitrase.

⁶Absori : “Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (*Sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif*) Hal. 241., 2009)

⁷Absori “ Hukum Penyelesaian sengketa lingkungan hidup “ dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup hal. 251, 2009

Konflik-konflik lingkungan pada umumnya melibatkan banyak pihak karena cirinya yang multi dimensi. Masyarakat sebagai pihak korban sering frustrasi karena tidak ditanggapinya keluhan dan laporan oleh pihak yang berwenang, dan rasa frustrasi ini dapat saja ditumpahkan pada sumber kegiatan yang merugikan dengan melakukan tindakan merusak (*destruktif*). Pada era reformasi di mana orang sudah mulai bebas berbicara, tindakan memanas-manasi untuk melakukan perusakan sangat potensial terjadi, lebih-lebih kelambatan penanganan oleh pihak yang berkompeten. Demikian pula upaya penyelesaian sengketa melalui Pengadilan pada umumnya memakan waktu lama dan hasilnya belum tentu memuaskan para pihak, bahkan dalam beberapa kasus, sering menempatkan masyarakat yang terkena dampak pada pihak lemah karena kesulitan dalam pembuktian atas pencemaran tersebut.

Untuk mengatasi keadaan tersebut, upaya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan merupakan alternatif pilihan yang tepat dan bijaksana. Penyelesaian sengketa dengan model ini merupakan konsep penyelesaian konflik secara kooperatif yang mampu mencerminkan tuntutan/kebutuhan pihak yang bersengketa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui cara “Mediasi” diKelurahan Wonoyoso Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan oleh UU No. 32 Tahun 2009

Kabupaten Pekalongan dikenal sebagai Kota Industri dengan pertumbuhan ekonominya yang cukup pesat karena salah satunya didukung oleh berkembangnya industri tekstil/batik/printing/*Laundry Jeans* berskala besar, menengah maupun kecil (*home industri*) maupun rumah untuk dijadikan usaha *industry Laundry Cucian Jeans* dan batik. Namun di sisi lain tidak dapat

terelakkan meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Pekalongan semakin meningkat.

Berdasarkan informasi awal dari Kantor UPL Pekalongan, kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup yang terjadi dalam periode setelah berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Misalnya Kasus Pencemaran Cucian Laundry Jeans di Wonoyoso, antara para pengusaha laundry melawan masyarakat Wonoyoso dan Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan yang terjadi pada tahun 2010 sampai 2013.

Dari kasus diatas, dapat diketahui bahwa kasus ini dilakukan untuk diselesaikan melalui cara penyelesaian di luar pengadilan, khususnya dengan cara “Mediasi”. Cara Mediasi dalam penyelesaian sengketa antara masyarakat Wonoyoso dengan para pengusaha laundry dan tahapan pertama, telah mempertemukan kedua belah pihak yang didampingi oleh mediator dari Perwakilan kelurahan Wonoyoso, Pemerintah kecamatan Buaran dan Polsek Buaran, Pertemuan pertama hasilnya dari pihak Pengusaha saling melempar tanggung jawab.

Cara Mediasi untuk penyelesaian kasus ini meskipun telah terjadi kesepakatan bersama dengan masyarakat Wonoyoso, namun dalam kenyataannya, pihak pengusaha tidak melaksanakan beberapa butir kesepakatan.

Dalam tulisan ini, penulis konsen untuk mengetahui apakah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui cara “Mediasi” di kelurahan Wonoyoso Kec. Buaran Kabupaten Pekalongan dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan oleh UU. No. 32 Tahun 2009, dan apa yang menjadi Faktor keberhasilan Penerapan UU. No. 32 Tahun 2009 Pasal 85 Tentang Penyelesaian Sengketa di luar Peradilan Lingkungan hidup di Kabupaten Pekalongan

Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui Proses Penyelesaian sengketa diluar Peradilan melalui cara Mediasi di kelurahan Wonoyoso kec. Buaran Kab. Pekalongan yang dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan oleh UU.No.32.Tahun 2009; dan untuk mengetahui Faktor keberhasilan penerapan UU

No. 32 Th. 2009 pasal 85 tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar Peradilan di kabupaten Pekalongan.

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kualitatif. Dalam usaha pengumpulan data, penulis menggunakan cara studi lapangan dan studi pustaka untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang merupakan gabungan pendekatan konsep normatif dengan konsep normologik yang metodenya disebut sebagai metode doktrinal dan non-doktrinal.

Menyikapi hal tersebut melalui gerakan massa, masyarakat Kabupaten Pekalongan berupaya mengadakan penekanan kepada Pemerintah Daerah dan Perusahaan Tekstil/industri batik printing berskala besar, menengah maupun kecil (*home industry*) yang telah melakukan pencemaran limbah dengan tujuan untuk mendapatkan solusi pemecahannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat penulis berkaitan dengan masalah usaha-usaha kelompok masyarakat yang berjuang menuntut hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat yang terjadi di Kabupaten Pekalongan dalam periode setelah berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, ada beberapa kasus yang menonjol, antara lain kasus pencemaran sungai Wonoyoso, antara Masyarakat Kelurahan Simbang Kulon Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan di satu pihak, melawan *Pengusaha Laundry Jeans* yang beralamat di desa Wonoyoso kec. Buaran Kab. Pekalongan yang terjadi pada tahun 2013. Kasus ini diselesaikan melalui cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, khususnya dengan cara "Mediasi". Adapun Mediasi dalam penyelesaian sengketa Sungai Wonoyoso telah mengupayakan dengan semaksimal mungkin terutama dalam menyikapi reaksinya masyarakat terhadap tuntutan berkaitan dengan pencemaran lingkungan limbah laundry Jeans. Namun dalam penyingkapannya, pertama telah mengalami kegagalan untuk mempertemukan para pengusaha dengan masyarakat korban pencemaran limbah.

Pembahasan Kasus

Kasus Pencemaran Limbah di desa Wonoyoso dirasa cukup meresahkan oleh masyarakat Wonoyoso dan Kelurahan Simbang Kulon karena Pengusaha Laundry cucian Jeans dan pengusaha Pemutih Kain, (daftar terlampir). Jumlahnya cukup banyak sampai 54 Pengusaha, 31 Pengusaha Laundry, 10 Pengusaha Pemutih Kain, 3 Printing Batik, 7 Pewarna batik, 3 Pembatik yang kesemuanya tidak terlepas dari bahan-bahan Kimia, sehingga masyarakat desa Wonoyoso dan Kelurahan Simbang Kulon protes kepada para pengusaha tersebut diatas, dengan beralamat desa Wonoyoso kec. Buaran Kabupaten Pekalongan, terjadi pada akhir tahun 2010 sampai dengan awal tahun 2013.

Penyajian Data

Berdasarkan informasi yang didapat penulis dari sejumlah responden yang terdiri dari : Bapak Tahril selaku Aparat Desa dan Bapak Mudzakir Sekretaris Desa Wonoyoso serta tokoh masyarakat di Kelurahan Wonoyoso, Ketua Forum Jasa gabungan dari Perusahaan Laundry “Rukun Sejahtera” (Daftar Pengurus terlampir), selaku wakil dari kelompok Pemuda, ketua BPD wonoyoso, (Kapolsek) Buaran serta perwakilan dari masing-masing perusahaan di wonoyoso, penulis mendapatkan suatu fakta sebagaimana akan penulis paparkan di bawah ini.

Pada awalnya masyarakat desa Wonoyoso kehidupannya bertani dan perbatik dengan Kelurahan Simbangkulon masyarakat kebanyakan perbatikan namun obat kimia yang dipakai masih bisa dinetralkan dengan Zat lain. Kemudian setelah datangnya perusahaan laundry, Masyarakat mulai merasakan tidak nyaman karena bau busuk, rasa gatal-gatal dari air sumur sehingga akhirnya melakukan unjuk rasa dan Protes kepada Perusahaan yang membuang limbah ke lahan irigasi perkampungan dan irigasi pertanian yang berada di desa Wonoyoso, lalu dari pihak Balai desa menyikapi memanggil para Pengusaha untuk datang ke Balai desa, terutama perusahaan-perusahaan yang berbahan kimia. Alasan masyarakat merasa resah akibat dari limbah perusahaan. serta mengakibatkan beberapa orang mengalami sakit sesak nafas serta batuk-batuk, gatal-gatal. Dan para petani pun juga merasa dirugikan karena hasil panen nya merugi akibat limbah.

Dalam usahanya menengahi permasalahan tersebut, Pihak kelurahan Wonoyoso termasuk dari Kecamatan Buaran serta Kapolsek Buaran berusaha menjembatani dua pihak yang saling bertentangan dengan mendudukkan diri sebagai fasilitator atau mediator sebanyak 4 (empat) kali pertemuan, yaitu :

Pertama, Pada tanggal 7 Maret 2010, masyarakat Wonoyoso dan masyarakat Kelurahan Simbangkulon, Kecamatan Buaran melakukan unjuk rasa ke Balai Desa Wonoyoso meminta untuk dipertemukan dengan para pengusaha yang mengeluarkan limbah. Dari pihak Balai Desa untuk menenangkan masa akhirnya dari Balai Desa mempertemukan kedua belah pihak antara Pihak Masyarakat dengan Pihak Para Pengusaha (Perwakilan). Namun setelah adanya pertemuan kedua belah pihak mediator belum bisa mencari titik temu sehingga hasilnya adalah gagal karena dari pihak perusahaan-perusahaan saling melempar tanggung jawab.

Kedua, Pertemuan berikutnya pada tanggal 12 Juni 2010 dari Balai Desa mengundang Kapolsek, Pihak Kecamatan serta masyarakat korban limbah dan memanggil lagi kepada pihak perwakilan-perwakilan perusahaan untuk menyikapi reaksi masyarakat terutama tuntutan masyarakat untuk segera direalisasikan oleh pihak perusahaan. Kemudian masyarakatpun berusaha agar tuntutannya segera terpenuhi.

Bentuk tuntutan dari masyarakat antara lain :

(a) Perusahaan harus membuat bak control/ipaL, (b) Perusahaan diminta untuk mengembalikan air bersih atau tidak berbahaya yang keluar dari Perusahaan, (c) Perusahaan hendaknya mempunyai Surat perijinan, (d) Adanya pipanisasi sampai bak control induk, (e) Perusahaan diminta untuk mengganti cerobong asap lebih tinggi karena berbau dan dimata terasa pedas.

Ketiga, Pihak Pemerintah Desa sebagai mediator selalu aktif dalam menangani kasus ini kemudian Pihak Pemerintah desa mengadakan rapat lagi di Balai Desa yang diundang Pada Tanggal 15 Oktober 2010 antara lain Dari Kapolsek Buaran, pihak kecamatan, tokoh masyarakat Wonoyoso, Ketua Forum Jasa gabungan dari Perusahaan Laundry “Rukun Sejahtera” (Daftar Pengurus terlampir), selaku wakil dari kelompok Pemuda, ketua BPD Wonoyoso,

serta Perwakilan dari masing-masing perusahaan di wonoyoso dari kapolsek mengusulkan agar dibuat sebuah Forum pengusaha, dari usulan ini forum rapat menyetujui akhirnya dibuatlah Forum yang bernama FORUM JASA “RUKUN SEJAHTERA” dan tertulislah anggota Forum Rukun Sejahtera (Pengurus terlampir).

Alasan Kapolsek mengusulkan untuk membentuk Forum tersebut agar ada yang bertanggung jawab ketika terjadi protes dari masyarakat untuk tidak saling lempar tanggung jawab.

Keempat, Pada 8 Februari 2011, Pemerintah desa mengadakan pertemuan lagi dengan masyarakat Wonoyoso dan Simbang kulon, dan yang diundang Dari Kapolsek Buaran, pihak kecamatan, tokoh masyarakat Wonoyoso, Ketua Forum Jasa gabungan dari Perusahaan Laundry “Rukun Sejahtera”, dari wakil kelompok Pemuda, ketua BPD wonoyoso, serta Perwakilan dari masing-masing perusahaan. Bahwa usulan masyarakat tetap melakukan tuduhan yang sama bahwa, dari dampak pencemaran kimia yang mengalir ke irigasi melalui sungai desa masyarakat sudah ada yang mengalami gangguan pernafasan, gatal-gatal dan batuk-batuk serta ada yang masuk rumah sakit, sehingga masyarakat mengancam apabila tuntutan tidak segera direalisasikan maka masyarakat akan mengerahkan massa lebih banyak dan akan melakukan unjuk. Sesuai dengan Pasal 91 UU No. 32 Tahun 2009 tentang “ Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”⁸ untuk mengatasi permasalahan ini Kapolsek berusaha memfasilitasi kembali untuk menengahnya, pada kesempatan tersebut perusahaan sudah mulai membuat ipal didalam Perusahaan, sehingga yang dihasilkan pada akhirnya hanya akan berupa cairan yang sudah siap dibuang ke sungai dan tidak merusak lingkungan. Perusahaan akan mengikuti kesepakatan yang dibuat bersama yang isi kesepakatan antara lain : (a); Perusahaan-perusahaan, bermaksud

⁸Absori “*Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif*hal. 253.,2009)

akan mengurangi usaha produksi, sesuai kebutuhan perusahaan dengan mengurangi operasi 24 jam. (b); Memperbaiki sistem pengolahan limbah air, khususnya bau sesuai dengan peraturan yang berlaku. (c); Perusahaan akan meninggikan cerobong pembuang asap. (d); Perusahaan akan mematuhi dan memenuhi yang diajukan oleh masyarakat.

Dari hasil survei Tim Ipal yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan tidak sesuai dengan ukuran lebih kecil dan air limbah yang keluar belum terurai masih hitam dan kental.

Kemudian dari tim Mediator (Kelurahan) mengusahakan mencari lahan tanah dibantaran sungai untuk dijadikan sebagai tempat penampungan limbah Induk. Dan dari pihak kelurahan mengajukan bantuan proposal ke pemerintah kabupaten Pekalongan.

Selanjutnya pada tanggal 14 April 2012 bantuan dari pemerintah kabupaten Pekalongan, memberikan bantuan ke kelurahan Wonoyoso dan kemudian dari pihak kelurahan membangun tempat bak limbah induk untuk menampung limbah dari beberapa perusahaan namun setelah dibangun ada kendala alat atau mesin pengurai limbah belum ada. Dari sini perusahaan-perusahaan seharusnya bisa membantu karena untuk kepentingan perusahaan. Namun kenyataannya perusahaan tidak membantu.

Pada pertengahan Juli 2012 kelurahan Wonoyoso mengajukan lagi bantuan berupa pengadaan mesin pengurai limbah, pada tanggal 21 Maret 2013 kelurahan mendapat bantuan berupa Mesin pengurai Limbah yang akhirnya sampai sekarang masyarakat sudah mau menerima atas dipenuhinya tuntutan.

Pembahasan dan Analisis Data

Untuk dapat memberikan penilaian “Problematika Penyelesaian Sengketa Lingkungan diluar peradilan melalui Cara Mediasi”, sebagaimana telah diupayakan untuk menyelesaikan masalah pencemaran Sungai yang ditimbulkan oleh Perusahaan Laundry yang terletak di Kelurahan Wonoyoso kecamatan Buaran

Kab.Pekalongan, maka terlebih dahulu penulis akan mengingatkan kembali apakah yang dimaksud dengan “mediasi”.

Penulis mengartikan mediasi adalah sebagai berikut :

Mediasi adalah upaya sederhana dan praktis dalam menyelesaikan persengketaan, yang didahului dengan cara mencari dan mempertemukan kesepakatan pemecahan masalah, dengan dibantu oleh seorang atau lebih selaku penengah yang bersifat netral dan hanya berfungsi sebagai fasilitator. Keputusan akhir berada pada kekuasaan pihak yang bersengketa yang dituangkan dalam suatu keputusan bersama.

Dengan beberapa batasan definisi tersebut di atas maka penulis berpendapat bahwa upaya mediasi telah pernah dicoba untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup pencemaran Sungai yang ditimbulkan oleh Perusahaan Laundry yang terletak di Kelurahan Wonoyoso, Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, utamanya yang dilakukan oleh Kelurahan Wonoyoso dan Kapolsek Pekalongan pada tahap penyelesaian sengketa I sampai dengan IV, hal ini disebabkan karena di antara kedua belah pihak yang bersengketa terdapat seorang penengah yang berfungsi memfasilitasi selaku mediator untuk menyelesaikan permasalahan. Cara mediasi sebagaimana dimaksudkan oleh Kabupaten Pekalongan, dengan mediator Kelurahan Wonoyoso, Kapolsek Buaran Kabupaten Pekalongan dan kemudian dilaksanakan pada Rapat Koordinasi Padatanggal 7 Maret 2010, sebagaimana dimaksudkan PP. 54 Tahun 2000, sebab untuk dapat bertindak sebagai “mediator”, sesuai ketentuan harus dipenuhi beberapa persyaratan, yaitu : (a); mediator disetujui oleh kedua belah pihak. (b); mediator tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan/atau hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa. (c); memiliki ketrampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan. (d); tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Selain daripada itu menurut ketentuan maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.

Salah satu yang terpenting adalah bahwa pada waktu diadakan penyelesaian sengketa kedua belah pihak yang bersengketa harus sama-sama hadir. Dan tidak boleh kepentingan masyarakat yang menjadi korban pencemaran lingkungan diwakilkan oleh karyawan/pegawai perusahaan. Oleh karena pada waktu diadakan rapat koordinasi dengan instansi terkait, dalam rangka penyelesaian sengketa Perusahaan Laundri tersebut yang diundang hanya pemilik perusahaan namun yang hadir adalah perwakilan sedang pihak Pemilik perusahaan tidak mau datang. Terlihat dari bentuk isi surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemilik perusahaan yang terkesan “didekte”. Seperti terdengar bisikan tak berbentuk yang memberikan peringatan apabila pernyataan tidak dipatuhi dan dilaksanakan maka perizinan akan dicabut dan perusahaan harus ditutup.

Dengan tiadanya keberadaan salah satu pihak dalam forum rapat koordinasi di atas maka hasil keputusan yang didapatkan bukanlah berbentuk “kesepakatan” dari pihak-pihak yang sedang bersengketa tetapi lebih merupakan suatu surat “pernyataan”, yang apabila ditinjau dari segi hukum tidak mempunyai kekuatan yuridis, tetapi tidak lebih hanya berkekuatan “moral” sehingga pemenuhannya tidak dapat dipaksakan, menurut hukum. Melalui model pendekatan “administrasi” ini, sebagaimana pendekatan “politis”, menurut Bruce Mitchell, apabila korupsi muncul, maka keputusan yang diambil tidak dapat dijamin memenuhi kepentingan banyak kelompok atau pihak yang seimbang.

Atas dasar penilaian-penilaian di atas penulis berpendapat bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa lingkungan dengan model mediasi untuk penyelesaian masalah pencemaran sungai yang ditimbulkan oleh Perusahaan Laundri yang terletak di Kelurahan Wonoyoso, Kecamatan Buaran, Kekurangannya adalah terletak pada prosedur/mechanisme ber”mediasi”, karena sebagaimana diakuinya sendiri ketentuan Undang-undang No. 32 tahun 2009 yang mengatur tentang Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Pasal 85 ayat 3 tentang Mediator dan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kapolsek Pekalongan menyatakan baru mengetahuinya. Mengenai hal

ini penulis dapat mengetahui misi/tugas yang diemban Kapolsek Buaran harus selalu mengetahui keadaan daerah yang dipimpin sehingga masyarakat dapat diciptakannya suasana kondusif dengan mengakomodir kepentingan kedua belah pihak yang sedang berseberangan agar tidak terjadi tindakan anarkis ataupun main hakim sendiri.

Adapun apabila ditinjau dari hasil yang dicapai, penulis berpendapat bahwa “mediasi” yang telah dicoba oleh Kapolsek Buaran adalah rapat yang pertama gagal dalam usaha “menengahi” sengketa, karena dari pihak Perusahaan hanya mewakilkan/utusan sehingga perwakilan /utusan tidak berani mengambil keputusan dalam kesepakatan rapat. “Mediasi” baru dapat dikatakan berhasil apabila permasalahan-permasalahan yang ada dapat *tereliminir* dengan baik sebagaimana dimaksudkan Pasal 84 UU No.32 Th.2009 ayat (1) yaitu bahwa dampak negatif terhadap lingkungan hidup yang pernah terjadi tidak terulang lagi.

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Penerapan UU. No. 32 Tahun 2009 Pasal 85 Tentang Penyelesaian Sengketa lingkungan hidup diluar Peradilan di Kabupaten Pekalongan Dan Solusinya

Berkaitan dengan hasil pembahasan dan analisa data kasus pencemaran Sungai oleh Perusahaan Laundry di Kelurahan Wonoyoso di kabupaten Pekalongan di atas, maka dengan demikian nampak dengan jelas bahwa faktor-faktor yang menyebabkan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dapat dilaksanakan melalui cara mediasi di Kabupaten Pekalongan menurut penulis adalah sebagai berikut :

Adanya undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.⁹

Pertama, Keseriusan dan Perannya Mediator dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di wonoyoso

Kedua, Adanya UU No. 32 Th 2009 Pasal 54 ayat (1) Tentang “ Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.”¹⁰

⁹Absori : Op. Cit hal. 251

Ketiga, Berfungsinya Pasal 85 UU No. 32 Th. 2009 ayat (3) berbunyi “ Dalam Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar Peradilan dapat digunakan jasa Mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Keempat, Dengan diperlakukan UU No.32 Th.2009 Pasal 85 ayat (3) masyarakat merasa punya peran dalam menyelesaikan masalah limbah.Keadaan yang demikianmemberikan kepada masyarakatuntuk semangat mengadakan pembentukan lembaga penyelesaian sengketa di luar peradilan yang bertujuan untuk mengefektifkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara alternatif di luar pengadilan.Meskipun peranannya hanya bersifat alternatif namun adalah menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan atau memfasilitasi terbentuknya lembaga tersebut di tiap-tiap daerah, sehingga apabila pada saatnya masyarakat menghendaki penyelesaian sengketa melalui jalur ini saat itu pula pemerintah sudah dapat memfasilitasinya.Dan keadaan ini pula sebagai resiko pemberlakuan asas subsidiaritas pada penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia.

Kelima, Pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan mulai mengetahui manfaat amanat Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai pelaksana Pasal 85 ayat (3), “.....

Keenam, Terbukanya pemerintah daerah untuk mendapatkan orang-orang (Sumber Daya Manusia) yang memiliki ketrampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan yang sudah berpengalaman menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Ketujuh, Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dapat mengawasi jalannya Industri mengenai dampak lingkungan Hidup.

Kedelapan, Turunnya bantuan Pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan berupa Pembangunan Penampungan Limbah dan Mesin Pengurai Limbah adalah salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam menangani lingkungan hidup.

¹⁰ Absori : Op. Cit. hal 250

Kesembilan, Perannya Masyarakat telah diatur dalam Undang-undang No.32 Th. 2009 Pasal 70 ayat (1) tentang” Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

PENUTUP

Kesimpulan

Memperhatikan hasil penelitian dan pembuktian dalam kepenulisan tesis ini pada akhirnya penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut, yaitu:

Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui cara “Mediasi” di Kelurahan Wonoyoso Kec. Buaran Kabupaten Pekalongan dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan oleh UU. No. 32 Tahun 2009.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat penulis, berkaitan dengan masalah usaha-usaha kelompok masyarakat yang berjuang menuntut hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat yang terjadi di Kabupaten Pekalongan dalam periode setelah berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, adalah dari kasus yang menonjol yaitu :

Desa Wonoyoso adalah daerah yang banyak bermunculan pengusaha-pengusaha baru terutama yang berhubungan Limbah : Laundry Jeans, Pemutih Kain sampai 54 pengusaha Kasus Pencemaran Limbah Sungai Irigasi Petani, antara Perusahaan Laundry Cucian Jeans melawan masyarakat Wonoyoso dan Kelurahan Simbangkulon Kec. Buaran Kabupaten Pekalongan yang terjadi pada tahun 2013.

Dari kasus di atas, dapat diketahui bahwa melalui pendekatan Negosiasi untuk diselesaikan melalui cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, khususnya dengan cara “Mediasi”. Hasil penelitian akhir dari masalah di atas tersebut bisa dapat diselesaikan dengan cara mediasi.

Buah dari hasil Mediasi untuk penyelesaian sengketa antara Perusahaan-perusahaan Laundry Jeans di Wonoyoso melawan dengan masyarakat

Wonoyosodikecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, sampai dengan waktu yang ditentukan tahap awal mengalami kegagalan karena dari salah satu pihak ada yang tidak hadir hanya diwakilkan.

Pada tahap kedua pertemuan mengalami titik terang antara lain memutuskan berupa “ Surat Pernyataan “ yang isinya antara lain dari pihak perusahaan siap untuk memenuhi tuntutan masyarakat wonoyoso. Pertemuan tahap ketiga Pihak Mediator telah berusaha untuk menyediakan lahan IPAL induk karena yang utama bahwa ipal yang dibuat diperusahaan –perusahaan ukurannya kecil tidak memenuhi standar ukuran IPAL. Sehingga Mediator mengusahakan lahan dibantaran sungai. Dilanjutkan pada rapat tahap berikutnya Mediator mempertemukan kembali dari kedua belah pihak yang isi dari pertemuan akan membangun IPAL Induk serta pengadaan Mesin Pengurai Limbah. dari penyelesaiannya melalui mediasi berjalan secara konsekuen dikarenakan banyak yang mempengaruhi dari kedua belah pihak untuk tidak konsekuen.Semuanya telah dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

Faktor keberhasilan Penerapan UU. No. 32 Tahun 2009 Pasal 85 Tentang Penyelesaian Sengketa lingkungan hidup di luar Peradilan di Kabupaten Pekalongan.

Pertama, Adanya Undang-undang No. 32 Tahun 2009 yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup.

Kedua, Peranan Mediatorsangatdominan dalam menangani kasus Penyelesaian sengketa Pencemaran Sungai irigasi diwonoyoso.

Ketiga, Adanya UU No.32 Tahun 2009 pasal 84, 85 dan 86 yang mengatur tentang cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Pengadilan maupun diluar peradilan.

Keempat, Peranan Kapolsek (Mediator) sangat pentingdalam pertemuan denganmemberikan solusi agar membentuk Forum, dan atas masukan dari kapolsek akhirnya terbentuklah Forum yang bernama FORUM RUKUN SEJAHTERA dalam kasus pencemaran limbah yang terjadi agar tidak saling lempar Tanggung jawab.

Kelima, Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan telah melakukan langkah-langkah kongkrit dalam menangani limbah sesuai pasal 45 ayat 2 UU No. 32 tahun 2009. berbunyi “ Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Keenam, Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dengan mendirikan lembaga Penyedia Jasa atau pendampingan masyarakat guna untuk menangani kasus-kasus limbah yang banyak terjadi di kabupaten Pekalongan.

Ketujuh, Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan telah terbantu adanya UU Pasal 86 (1) No, 32 Th.2009 dapat merekrut tenaga-tenaga profesional dalam bidang lingkungan hidup. Sehingga kasus limbah yang terjadi di Kabupaten Pekalongan bisa tertangani lebih cepat.

Saran

Pertama, Kepada Pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan seharusnya melakukan sosialisasi Undang-undang No.32 tahun 2009 secara continue (terus menerus) terhadap masyarakat Pekalongan

Kedua, Kepada pihak Perusahaan hendaknya tidak bersikap pasif dalam penanganan limbah

Ketiga, Kepada Mediator mempunyai peranan penting dalam penyelesaian kasus limbah, sehingga hendaknya harus lebih aktif dan responsif.

Perlunya adanya pelatihan dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani permasalahan sengketa limbah.

Keempat, Kepada Perusahaan harus beritikad baik terhadap lingkungan, dan ekologi. Bisa berupa membangun IPAL sesuai ketentuan, dan bersedia memberi ganti rugi terhadap warga.

Bagi masyarakat, untuk tidak segan menuntut haknya, melalui prosedur dan ketentuan perundang-undangan.

Kelima, Kepada Pemerintah daerah harus mensosialisasikan Undang-undang yang berhubungan dengan lingkungan pasal 85 ayat 3 yang berbunyi “

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Keenam, Kepada Pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan harus memberikan kesadaran kepada para pihak terutama perusahaan – perusahaan yang ada di Kabupaten Pekalongan tentang pentingnya pengelolaan limbah.

Ketujuh, Kepada Pihak Perusahaan harus beritikad baik terhadap lingkungan, dan ekologi. Bisa berupa membangun IPAL sesuai ketentuan, dan bersedia memberi ganti rugi terhadap warga.

Kedelapan, Kepada Pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan seharusnya memperketat perizinan terhadap perusahaan-perusahaan yang menimbulkan Limbah terutama limbah yang berbahaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdurrahman. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Bandung: Alumni, 1983.

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Bahan Kuliah, 2003.

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum Jakarta (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Gunung Agung, 2002.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

- Bruce, Mitchel. B. Setiawan & Dwita Hadi Rahmi. *Pengelolaan Sumberdaya Dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Danusaputro, Munadjat. *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*. Bandung : Binacipta, 1980.
- Danusaputro, Munadjat. *Hukum Lingkungan Buku II: Umum*. Bandung: Binacipta, 1980.
- Fuady, Munir. *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Goodpaster, Gary .*Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*. Jakarta: ELIPS Project, 1993.
- Harahap, M, Yahya. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Margono, Suyud. *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno. *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan di Indonesia sejak 1942, Dan apakah Kemanfaatannya bagi Kita Bangsa Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung, 1985.
- Moore, Chritopher W. *Mediasi Lingkungan*. Jakarta: Indonesian Centre for Environmental Law dan CDR Associates, 1985.
- Muchsin,& Fadillah Putra. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Malang: Averroes Press, 2002.
- Rahardjo, Satjipto. *Beberapa Pemikiran tentang Ancangan Antar Disiplin dalam Pembaharuan Hukum Nasional*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1982.
- Santosa, Mas Achmad dan Anthony LP. Hutapea. *Mendayagunakan Mekanisme Alternatife Sengketa Lingkungan (MAPS) di Indonesia*. Jakarta: WALHI, 1992.
- Santosa, Mas Achmad. *Pelembagaan Alternative Dispute Resolution (ADR) di Beberapa Negara*. Jakarta: Majalah Musyawarah Nomor 1 tahun 1, 1997.
- Silalahi, Daud. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni, 1992.

- Soegianto, Apriliani. *Bibliografi Beranotasi tentang Lingkungan laut dan Pencemaran Laut*. Jakarta: Lembaga Oceanologi Nasional, 1976.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali, 1985.
- Soekanto Soerjono. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali, 1980.
- Soemartono, P. Gatot. *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Soemarwoto, Otto. *Analisa Dampak Lingkungan Proyek PLTA Saguling PSL*. Bogor: IPB, 1981.
- Soemarwoto, Otto. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan, 2001.
- Soemarwoto, Otto. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan, 2001.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Soerianegara. *Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Bogor: Fakultas Pasca Sarjana IPB, 1979.
- Soeryani, Mohamed. *Dasar-dasar Ekologi, makalah pada kursus AMDAL*. Jakarta: UI, 1982.
- Sudarwanto, Al Sentot. *Kebijakan Menteri Lingkungan Hidup tentang Audit LH*. Semarang: Lembaga Pengembangan Ilmu Hukum Dan Manajemen IBLAM, 2000.
- Sudarwanto, Al Sentot. *Penerapan PP. No.27 Tahun 1999 tentang AMDAL berkaitan dengan Otonomi Daerah*. Semarang: Lembaga Pengembangan Ilmu Hukum IBLAM, 2000.
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Wijoyo, Suparto. *Penyelesaian Sengketa Menurut UUPLH*. Jakarta: Jurnal Hukum Lingkungan, 1999.

Jurnal

- Absori : “Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (*Sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif*) Hal. 241.,2009)
- Bruce, Mitchell, “*Resource and Environmental Management*” diterjemahkan dan disadur oleh B. Setiawan dan Dwita Hadi Rahmi “*Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup*” (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), 368
- George, Martin, Montclair State University - Department of Sociology. December 18, 2012
- George, Martin, Montclair State University - Department of Sociology December 18, 2012
- Montclair, State University - Department of Earth and Environmental Studies Michael P. Weinstein, Montclair State University - PSEG Institute for Sustainability Studies
- OIDA International Journal of Pembangunan Berkelanjutan*, Vol. 3, No 8, hlm 101-106, 2012 The Role of Water, Food Security and Poverty Alleviation in the Context of Sustainable Livelihoods
- OIDA International Journal of Sustainable Development*, Vol. 5, No. 6, pp. 70-80, 2012.
- OIDA International Journal of Sustainable Development*, Vol. 5, No. 6, pp. 70-80, 2012 System Dynamic Model Approach for Urban Watershed Sustainability Study
- The IUP Journal of Infrastructure*, Vol. IX, No. 2, pp. 34-43, June 2011. The Global Water Crisis: Issues and Solutions Manzoor Kooloth Peedikayil Jr.

ALTERNATIF DISPUTE RESOLUTION

(ADR)PENYELESAIANSENGKETA PENCEMARAN LINGKUNGAN

(Studi Kasus di Kelurahan Wonoyoso Kabupaten Pekalongan)

Oleh :

M. Hamdi
Universitas Muhammadiyah Surakarta
email: hamdi140469@yahoo.com

ABSTRACT

Development is a conscious effort to cultivate and utilize natural resources to improve the welfare of the people, both to achieve born prosperity and inner satisfaction. Therefore, the use of natural resources must be harmonious and balanced with environmental functions. The increase of public awareness has prompted the emergence of demands so that various activities such as the development of industrial activity can be run in a more environmentally responsible. But sometimes there is a tendency that the person which in charge of the industry ignored the environmental requirements such as the Environmental Impact Assessment (EIA), the ownership and operation of the Waste Processing Unit and other requirements. The environment is potentially make the different opinion, interest or the perception of the "stakeholders". When the views on the environment is still moving from the respective of interests, then the dispute/conflict will always arise. To overcome the problems of environmental disputes, Article 84 paragraph (1) of Law No. 32 year 2009 has determined that: environmental dispute settlement can be reached through the court or out of court. The settlement of environmental disputes out of court according to Law Article 85 paragraph 3 Number 32 in 2009 can be reached through mediation and arbitration. As the executor of the law, to make effective alternative dispute resolution conducted outside the court. The method of this research is a socio-juridical. Juridical is an approach using legislation or norms or legal concepts especially environmental laws that rule the way to settle down the disputes out of court. Sociological is an approach based on the implementation of the settlement of disputes through the mediation. After the author conducted research in the field, it has been discovered some important things, the Local Government of Kabupaten Pekalongan should immediately continue to disseminate the Act No. 32 year 2009 to Pekalongan society, how to resolve the environmental disputes out of court, with a low cost, easy way, do not take so long and can generate win-win solution and can immediately stop the problems/disputes and the environment can be safe.

Keywords: ADR, Sengketa, Pekalongan

PENDAHULUAN

Salah satu masalah yang paling krusial yang dihadapi umat manusia saat ini adalah pelestarian lingkungan. Pencemaran lingkungan di sekitar bumi pertiwi

sangat mempengaruhi tidak hanya kehidupan manusia tetapi juga seluruh organisme hidup. Masalah lingkungan telah mendapat perhatian dari seluruh dunia seperti yang diakui sebagai bencana di seluruh dunia. Alasan utama dari masalah ini adalah meningkatkan aktivitas manusia dalam masyarakat modern yang telah mempercepat laju pencemaran lingkungan.

Secara global, ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup manusia. Pada kenyataannya, gaya hidup masyarakat industri ditandai oleh pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah berbahaya dan beracun.¹¹ Hal itu merupakan tantangan yang besar terhadap cara pembuangan yang aman dengan resiko yang kecil terhadap lingkungan hidup, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Menyadari hal tersebut di atas, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu dikelola dengan baik. Serta Polusi industri merupakan penyebab utama degradasi lingkungan yang pada gilirannya merupakan faktor kunci dalam mengubah peristiwa cuaca ekstrim menjadi bencana alam. Degradasi lingkungan tidak hanya mengintensifkan bencana tetapi juga meningkatkan potensi bencana sekunder.¹² Dari sudut pandang respon terhadap peristiwa mengganggu masyarakat terlihat kepada para pemangku kepentingan, lembaga dan pemerintah. Tesis ini membahas bagaimana hal ini dapat dicapai melalui pembentukan tekanan masyarakat pada unit polusi industri lokal yang diciptakan oleh penyediaan informasi yang sesuai dalam domain publik yang ditafsirkan untuk konsumsi masyarakat dengan elemen masyarakat (*Mediator*). Kedua dengan menggunakan pengetahuan yang berhubungan dengan keselamatan industri dan manajemen risiko untuk memacu pra-bencana tindakan di tingkat masyarakat.

Sebuah ekologi sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui interaksi dinamis antara lingkungan alam dan masyarakat manusia dan untuk model tren jangka panjang dalam dampak

¹¹The IUP Journal of Infrastructure, Vol. IX, No. 2, pp. 34-43, June 2011 The Global Water Crisis: Issues and Solutions Manzoor Kooloth Peedikayil Jr.

¹² Soemarwoto Otto. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta : Djambatan, 2001.

lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.¹³ Saat ini masyarakat yang hidup gaya modern, preferensi dalam hidup, dan sikap terhadap alam tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga kepribadian manusia mendistorsi dan pola nilai. Etika lingkungan hidup adalah cara terbaik untuk melindungi hak asasi manusia dari pencemaran lingkungan. Etika lingkungan yang dibutuhkan untuk memainkan peran utama dalam melestarikan lingkungan. Sejalan dengan peningkatan kesadaran masyarakat tersebut, mendorong munculnya tuntutan agar berbagai aktivitas pembangunan seperti aktivitas industri dapat dijalankan secara lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan, melalui suatu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pelestarian daya dukung lingkungan, sebuah ekologi sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia.¹⁴ sehingga dampak buruk yang sekiranya muncul dapat diperkirakan, diantisipasi, dikurangi atau bahkan dihilangkan sama sekali.

Namun yang terjadi kadangkala terdapat kecenderungan di mana penanggung jawab industri mengabaikan berbagai persyaratan-persyaratan lingkungan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), pemilikan dan pengoperasian Unit Pengolah Limbah (UPL) dan persyaratan lainnya. Cukup banyak kasus-kasus yang terjadi di mana UPL tidak dioperasikan dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dibuang begitu saja ke media lingkungan.¹⁵

Di pihak lain, masyarakat yang dirugikan atas tindakan pencemaran lingkungan, tidak mampu mengajukan sendiri kompensasi, baik kompensasi berupa ganti rugi maupun tindakan perbaikan/pemulihan lingkungan, karena alasan ketidaktahuan peraturan perundangan yang akan dijadikan pijakan penuntutan maupun faktor biaya yang bagi mereka masih menjadi keragu-raguan karena dibayangi akan resiko kalah bila menuntut ke Pengadilan.

¹³ *OIDA International Journal of Sustainable Development*, Vol. 5, No. 6, pp. 70-80, 2012
 Montclair State University - Department of Earth and Environmental Studies
 Michael P. Weinstein, Montclair State University - PSEG Institute for Sustainability Studies
 George Martin, Montclair State University - Department of Sociology
 December 18, 2012

¹⁴ *OIDA International Journal of Sustainable Development*, Vol. 5, No. 6, pp. 70-80, 2012¹⁴
 System Dynamic Model Approach for Urban Watershed Sustainability Study

¹⁵ *OIDA International Journal of Pembangunan Berkelanjutan*, Vol. 3, No 8, hlm 101-106,
 2012
 The Role of Water, Food Security and Poverty Alleviation in the Context of Sustainable Livelihoods

Beberapa konflik pencemaran air misalnya: Lapindo di Jawa Timur, Kasus Acidatama Chemical Industry (Surakarta), Kasus Bomatex (Ungaran), SEJ (Batang), Kasus Sungai Ciujung (Serang Jawa Barat), Kasus Pabrik Jamur Merang (Klaten), Kasus *Perusahaan Laundry Cucian Jeans di Pekalongan*, Kab. Pekalongan dari kasus terakhir tersebut terjadi di Kabupaten Pekalongan.

Terjadinya pencemaran air sebagian besar karena tidak adanya atau tidak memadainya unit pengolah limbah. Ketidakpatuhan para penanggung jawab kegiatan yang disebabkan oleh sikap “*eksternalitas negatif*” yaitu keengganan menanggung biaya pengolah limbah.

Sedangkan yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan menurut Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, adalah Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup¹⁶. Selain tindakan pencemaran lingkungan hidup, sebab-sebab lainnya yang dapat menyebabkan timbulnya sengketa adalah perusakan lingkungan hidup yang diartikan sebagai tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Untuk mengatasi berbagai permasalahan sengketa lingkungan hidup tersebut, Pasal 84 ayat 1 dan Pasal 85 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Penyelesaian Sengketa dari salah pihak bisa melalui Pengadilan atau diluar Peradilan.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan pasal 85 ayat 1 No. 32 Tahun 2009 “Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar Peradilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai: (a) Bentuk dan besarnya ganti rugi. (b) tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan. (c) tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya dan pencemaran dan/atau

¹⁶Absori : “Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (*Sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif*) Hal. 241., 2009)

perusakan. (d) tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.¹⁷

Dalam konsepnya, penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dapat ditempuh beberapa cara yaitu : Negoisasi, mediasi, dan Arbitrase.

Konflik-konflik lingkungan pada umumnya melibatkan banyak pihak karena cirinya yang multi dimensi. Masyarakat sebagai pihak korban sering frustasi karena tidak ditanggapinya keluhan dan laporan oleh pihak yang berwenang, dan rasa frustasi ini dapat saja ditumpahkan pada sumber kegiatan yang merugikan dengan melakukan tindakan merusak (*destruktif*). Pada era reformasi di mana orang sudah mulai bebas berbicara, tindakan memanas-manasi untuk melakukan perusakan sangat potensial terjadi, lebih-lebih kelambatan penanganan oleh pihak yang berkompeten. Demikian pula upaya penyelesaian sengketa melalui Pengadilan pada umumnya memakan waktu lama dan hasilnya belum tentu memuaskan para pihak, bahkan dalam beberapa kasus, sering menempatkan masyarakat yang terkena dampak pada pihak lemah karena kesulitan dalam pembuktian atas pencemaran tersebut.

Untuk mengatasi keadaan tersebut, upaya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan merupakan alternatif pilihan yang tepat dan bijaksana. Penyelesaian sengketa dengan model ini merupakan konsep penyelesaian konflik secara kooperatif yang mampu mencerminkan tuntutan/kebutuhan pihak yang bersengketa.

Kabupaten Pekalongan dikenal sebagai Kota Batik dan Tekstil. Pertumbuhan ekonominya cukup pesat karena salah satunya didukung oleh berkembangnya industri tekstil/batik/printing berskala besar, menengah maupun kecil (home industri). Namun di sisi lain tidak dapat terelakkan meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan informasi awal dari Kantor UPL Pekalongan, kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup yang terjadi dalam periode setelah berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Misalnya Kasus Pencemaran Cucian

¹⁷Absori “ Hukum Penyelesaian sengketa lingkungan hidup “ dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup hal.251,2009

Laundry Jeans di Wonoyoso, antara para pengusaha laundry melawan masyarakat Wonoyoso dan Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan yang terjadi pada tahun 2010 sampai 2014.

Dari kasus diatas, dapat diketahui bahwa kasus ini dilakukan untuk diselesaikan melalui cara penyelesaian di luar pengadilan, khususnya dengan cara “Mediasi”. Cara Mediasi dalam penyelesaian sengketa antara masyarakat Wonoyoso dengan para Pengusaha Laundry dan tahapan pertama, telah mempertemukan kedua belah pihak yang didampingi oleh mediator dari Perwakilan kelurahan Wonoyoso, Pemerintah kecamatan Buaran dan Polsek Buaran, Pertemuan pertama hasilnya dari pihak Pengusaha saling melempar tanggung jawab.

Cara Mediasi untuk penyelesaian kasus ini meskipun telah terjadi kesepakatan bersama dengan masyarakat Wonoyoso, namun dalam kenyataannya, pihak pengusaha tidak melaksanakan beberapa butir kesepakatan.

Dalam tulisan ini, penulis konsen untuk mengetahui apakah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui cara “Mediasi” di kelurahan Wonoyoso Kec. Buaran Kabupaten Pekalongan dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan oleh UU. No. 32 Tahun 2009, dan apa yang menjadi Faktor keberhasilan Penerapan UU. No. 32 Tahun 2009 Pasal 85 Tentang Penyelesaian Sengketa di luar Peradilan Lingkungan hidup di Kabupaten Pekalongan

Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui Proses Penyelesaian sengketa diluar Peradilan melalui cara Mediasi di kelurahan Wonoyoso kec. Buaran Kab. Pekalongan yang dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan oleh UU. No. 32. Tahun 2009; dan untuk mengetahui Faktor keberhasilan penerapan UU No. 32 Th. 2009 pasal 85 tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar Peradilan di kabupaten Pekalongan.

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kualitatif. Dalam usaha pengumpulan data, penulis menggunakan cara studi lapangan dan studi pustaka untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder. Sedangkan metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis

yang merupakan gabungan pendekatan konsep normatif dengan konsep normologik yang metodenya disebut sebagai metode doktrinal dan non-doktrinal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui cara “Mediasi” di Kelurahan Wonoyoso Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan oleh UU No. 32 Tahun 2009

Kabupaten Pekalongan dikenal sebagai Kota Batik dengan pertumbuhan ekonominya yang cukup pesat karena salah satunya didukung oleh berkembangnya industri tekstil/batik/printing/*Laundry Jeans* berskala besar, menengah maupun kecil (*home industri*) maupun rumah untuk dijadikan usaha *industry Laundry Cucian Jeans* dan batik. Namun di sisi lain tidak dapat terelakkan meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Pekalongan semakin meningkat.

Menyikapi hal tersebut melalui gerakan massa, masyarakat Kabupaten Pekalongan berupaya mengadakan penekanan kepada Pemerintah Daerah dan Perusahaan Tekstil/industry batik printing berskala besar, menengah maupun kecil (*home industri*) yang telah melakukan pencemaran limbah dengan tujuan untuk mendapatkan solusi pemecahannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat penulis berkaitan dengan masalah usaha-usaha kelompok masyarakat yang berjuang menuntut hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat yang terjadi di Kabupaten Pekalongan dalam periode setelah berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, ada beberapa kasus yang menonjol, antara lain kasus pencemaran sungai Wonoyoso, antara Masyarakat Kelurahan Simbang Kulon Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan di satu pihak, melawan *Pengusaha Laundry Jeans* yang beralamat di desa Wonoyoso kec. Buaran Kab. Pekalongan yang terjadi pada tahun 2013. Kasus ini diselesaikan melalui cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, khususnya dengan cara “Mediasi”. Adapun Mediasi dalam penyelesaian sengketa Sungai Wonoyoso telah mengupayakan dengan semaksimal mungkin terutama dalam menyikapi reaksinya masyarakat terhadap tuntutan berkaitan dengan pencemaran

lingkungan limbah laundry Jeans. Namun dalam penyingkapannya, pertama telah mengalami kegagalan untuk mempertemukan para pengusaha dengan masyarakat korban pencemaran limbah.

Pembahasan Kasus

Kasus Pencemaran Limbah didesa Wonoyoso dirasa cukup meresahkan oleh masyarakat Wonoyoso dan Kelurahan Simbang Kulon karena Pengusaha Laundry cucian Jeans dan pengusaha Pemutih Kain,(daftar terlampir).Jumlahnya cukup banyak sampai 54 Pengusaha, 31 Pengusaha Laundry,10 Pengusaha Pemutih Kain, 3 Printing Batik, 7 Pewarna batik, 3 Pembatik yang kesemuanya tidak terlepas dari bahan-bahan Kimia, sehingga masyarakat desa Wonoyoso dan Kelurahan Simbang Kulon Protes kepada Para Pengusaha tersebut diatas, dengan beralamat desa Wonoyosokec.BuaranKabupaten Pekalongan, terjadi pada akhir tahun 2010 sampai dengan awal tahun 2012.

Penyajian Data

Berdasarkan informasi yang didapat penulis dari sejumlah responden yang terdiri dari : Bapak Tahril selaku Aparat Desa dan Bapak Mudzakir Sekretaris Desa Wonoyoso serta tokoh masyarakat di Kelurahan Wonoyoso, Ketua Forum Jasa gabungan dari Perusahaan Laundry “Rukun Sejahtera” (Daftar Pengurus terlampir),selaku wakil dari kelompok Pemuda, ketua BPD wonoyoso, (Kapolsek) Buaran sertaPerwakilan dari masing-masing perusahaan di wonoyoso, penulis mendapatkan suatu fakta sebagaimana akan penulis paparkan di bawah ini.

Pada awalnya masyarakat desaWonoyoso kehidupannya bertani dan perbatikandengan Kelurahan Simbangkulonmasyarakat kebanyakan perbatikan namun obat kimia yang dipakai masih bisa dinetralkan dengan Zat lain. Kemudian setelah datangnya perusahaan perusahaan laundry, Masyarakat mulai merasakan tidak nyaman karena bau busuk, rasa gatal-gatal dari air sumur sehingga akhirnya melakukan unjuk rasa dan Protes kepada Perusahaan yang membuang limbah kelahan irigasi perkampungan dan irigasi pertanian yang berada didesa wonoyoso, lalu dari pihak Balai desa menyikapi memanggil para Pengusaha untuk datang ke Balaidesa, terutama perusahaan-perusahaan yang berbahan kimia. Alasan masyarakat merasa resah akibat dari limbah perusahaan.serta

mengakibatkan beberapa orang mengalami sakit sesak nafas serta batuk-batuk, gatal-gatal. Dan para petanipun juga merasa dirugikan karena hasil panen nya merugi akibat limbah.

Dalam usahanya menengahi permasalahan tersebut, Pihak kelurahan wonoyoso termasuk dari Kecamatan serta Kapolsek berusaha menjembatani dua pihak yang saling bertentangan dengan mendudukkan diri sebagai fasilitator atau mediator sebanyak 4 (empat) kalipertemuan, yaitu :

- 1) Pada tanggal 7 Maret 2010, masyarakat Wonoyoso dan masyarakat Kelurahan Simbangkulon, Kecamatan Buaran melakukan unjuk rasa ke Balai Desa wonoyoso meminta untuk dipertemukan dengan para pengusaha yang mengeluarkan limbah. Dari pihak balai desa untuk menenangkan masa akhirnya dari balai desa mempertemukan kedua belah pihak antara Pihak Masyarakat dengan Pihak Para Pengusaha (Perwakilan). Namun setelah adanya pertemuan kedua belah pihak mediator belum bisa mencari titik temu sehingga hasilnya adalah gagal karena dari pihak perusahaan-perusahaan saling melempar tanggung jawab.
- 2) Pertemuan berikutnya pada tanggal 12 Juni 2010 dari Balai desa mengundang Kapolsek, Pihak Kecamatan serta masyarakat korban limbah dan memanggil lagi kepada pihak perwakilan-perwakilan perusahaan untuk menyikapi reaksi masyarakat terutama tuntutan masyarakat untuk segera direalisasikan oleh pihak perusahaan. Kemudian masyarakatpun berusaha agar tuntutannya segera terpenuhi.

Bentuk tuntutan dari masyarakat antara lain :

- (a) Perusahaan harus membuat bak control/ipaL, (b) Perusahaan diminta untuk mengembalikan air bersih atau tidak berbahaya yang keluar dari Perusahaan, (c) Perusahaan hendaknya mempunyai Surat perijinan, (d) Adanya pipanisasi sampai bak control induk, (e) Perusahaan diminta untuk mengganti cerobong asap lebih tinggi karena berbau dan dimata terasa pedas.
- 3) Pihak Pemerintah Desa sebagai mediator selalu aktif dalam menangani kasus ini kemudian Pihak Pemerintah desa mengadakan rapat lagi di balai desa yang diundang Pada Tanggal 15 Oktober 2010 antara lain Dari Kapolsek Buaran,

pihak kecamatan, tokoh masyarakat Wonoyoso, Ketua Forum Jasa gabungan dari Perusahaan Laundry “Rukun Sejahtera” (Daftar Pengurus terlampir), selaku wakil dari kelompok Pemuda, ketua BPD wonoyoso, serta Perwakilan dari masing-masing perusahaan di wonoyoso dari kapolsek mengusulkan agar dibuat sebuah Forum pengusaha, dari usulan ini forum rapat menyetujui akhirnya dibuatlah Forum yang bernama FORUM JASA “RUKUN SEJAHTERA” dan tertulislah anggota Forum Rukun Sejahtera (Pengurus terlampir).

Alasan Kapolsek mengusulkan untuk membentuk Forum tersebut agar ada yang bertanggung jawab ketika terjadi protes dari masyarakat untuk tidak saling lempar tanggung jawab.

- 4) Pada 8 Februari 2011, Pemerintah desa mengadakan pertemuan lagi dengan masyarakat Wonoyoso dan Simbang kulon, dan yang diundang Dari Kapolsek Buaran, pihak kecamatan, tokoh masyarakat Wonoyoso, Ketua Forum Jasa gabungan dari Perusahaan Laundry “Rukun Sejahtera”, dari wakil kelompok Pemuda, ketua BPD wonoyoso, serta Perwakilan dari masing-masing perusahaan. Bahwa usulan masyarakat tetap melakukan tuduhan yang sama bahwa, dari dampak pencemaran kimia yang mengalir ke irigasi melalui sungai desa masyarakat sudah ada yang mengalami gangguan pernafasan, gatal-gatal dan batuk-batuk serta ada yang masuk rumah sakit, sehingga masyarakat mengancam apabila tuntutan tidak segera direalisasikan maka masyarakat akan mengerahkan massa lebih banyak dan akan melakukan unjuk. Sesuai dengan Pasal 91 UU No. 32 Tahun 2009 tentang “Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”¹⁸ untuk mengatasi permasalahan ini Kapolsek berusaha memfasilitasi kembali untuk menengahnya, pada kesempatan tersebut perusahaan sudah mulai membuat ipal didalam Perusahaan, sehingga yang

¹⁸Absori “*Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif*” hal. 253., 2009)

dihasilkan pada akhirnya hanya akan berupa cairan yang sudah siap dibuang ke sungai dan tidak merusak lingkungan. Perusahaan akan mengikuti kesepakatan yang dibuat bersama yang isi kesepakatan antara lain :

- a) Perusahaan-perusahaan, bermaksud akan mengurangi usaha produksi, sesuai kebutuhan perusahaan dengan mengurangi operasi 24 jam.
- b) Memperbaiki sistem pengolahan limbah air, khususnya bau sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c) Perusahaan akan meninggikan cerobong pembuang asap.
- d) Perusahaan akan mematuhi dan memenuhi yang diajukan oleh masyarakat.

Dari hasil survei Tim Ipal yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan tidak sesuai dengan ukuran lebih kecil dan air limbah yang keluar belum terurai masih hitam dan kental.

Kemudian dari tim Mediator (Kelurahan) mengusahakan mencari lahan tanah dibantaran sungai untuk dijadikan sebagai tempat penampungan limbah Induk. Dan dari pihak kelurahan mengajukan bantuan proposal ke pemerintah kabupaten Pekalongan.

Selanjutnya pada tanggal 14 April 2012 bantuan dari pemerintah kabupaten Pekalongan, memberikan bantuan ke kelurahan Wonoyoso dan kemudian dari pihak kelurahan membangun tempat bak limbah induk untuk menampung limbah dari beberapa perusahaan namun setelah dibangun ada kendala alat atau mesin pengurai limbah belum ada. Dari sini perusahaan-perusahaan seharusnya bisa membantu karena untuk kepentingan perusahaan. Namun kenyataannya perusahaan tidak membantu.

Pada pertengahan Juli 2012 kelurahan Wonoyoso mengajukan lagi bantuan berupa pengadaan mesin pengurai limbah, pada tanggal 21 Maret 2013 kelurahan mendapat bantuan berupa Mesin pengurai Limbah yang akhirnya sampai sekarang masyarakat sudah mau menerima atas dipenuhinya tuntutan.

Pembahasan dan Analisis Data

Untuk dapat memberikan penilaian “Problematika Penyelesaian Sengketa Lingkungan diluar peradilan melalui Cara Mediasi”, sebagaimana telah diupayakan untuk menyelesaikan masalah pencemaran Sungai yang ditimbulkan

oleh Perusahaan Laundry yang terletak di Kelurahan Wonoyoso kecamatan Buaran Kab. Pekalongan, maka terlebih dahulu penulis akan mengingatkan kembali apakah yang dimaksud dengan “mediasi”.

Penulis mengartikan mediasi adalah sebagai berikut :

Mediasi adalah upaya sederhana dan praktis dalam menyelesaikan persengketaan, yang didahului dengan cara mencari dan mempertemukan kesepakatan pemecahan masalah, dengan dibantu oleh seorang atau lebih selaku penengah yang bersifat netral dan hanya berfungsi sebagai fasilitator. Keputusan akhir berada pada kekuasaan pihak yang bersengketa yang dituangkan dalam suatu keputusan bersama.

Dengan beberapa batasan definisi tersebut di atas maka penulis berpendapat bahwa upaya mediasi telah pernah dicoba untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup pencemaran Sungai yang ditimbulkan oleh Perusahaan Laundry yang terletak di Kelurahan Wonoyoso, Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, utamanya yang dilakukan oleh Kelurahan Wonoyoso dan Kapolsek Pekalongan pada tahap penyelesaian sengketa I sampai dengan IV, hal ini disebabkan karena di antara kedua belah pihak yang bersengketa terdapat seorang penengah yang berfungsi memfasilitasi selaku mediator untuk menyelesaikan permasalahan. Sedangkan cara mediasi sebagaimana dimaksudkan oleh Kabupaten Pekalongan, dengan mediator Kelurahan Wonoyoso, Kapolsek Buaran Kabupaten Pekalongan dan kemudian dilaksanakan pada Rapat Koordinasi Padatanggal 7 Maret 2010, sebagaimana dimaksudkan PP. 54 Tahun 2000, sebab untuk dapat bertindak sebagai “mediator”, sesuai ketentuan harus dipenuhi beberapa persyaratan, yaitu :

- (1) mediator disetujui oleh kedua belah pihak.
- (2) mediator tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan/atau hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- (3) memiliki ketrampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan.
- (4) tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Selain daripada itu menurut ketentuan maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.

Satu satu yang terpenting adalah bahwa pada waktu diadakan penyelesaian sengketa kedua belah pihak yang bersengketa harus sama-sama hadir. Dan tidak boleh kepentingan masyarakat yang menjadi korban pencemaran lingkungan diwakilkan oleh karyawan/pegawai perusahaan. Oleh karena pada waktu diadakan rapat koordinasi dengan instansi terkait, dalam rangka penyelesaian sengketa Perusahaan Laundry tersebut yang diundang hanya pemilik perusahaan namun yang hadir adalah perwakilan sedang pihak Pemilik perusahaan tidak mau datang. Sehingga terlihat dari bentuk isi surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemilik perusahaan yang terkesan “didekte”. Sehingga seperti terdengar bisikan tak berbentuk yang memberikan peringatan apabila pernyataan tidak dipatuhi dan dilaksanakan maka perizinan akan dicabut dan perusahaan harus ditutup.

Dengan tiadanya keberadaan salah satu pihak dalam forum rapat koordinasi di atas maka hasil keputusan yang didapatkan bukanlah berbentuk “kesepakatan” dari pihak-pihak yang sedang bersengketa tetapi lebih merupakan suatu surat “pernyataan”, yang apabila ditinjau dari segi hukum tidak mempunyai kekuatan juridis, tetapi tidak lebih hanya berkekuatan “moral” sehingga pemenuhannya tidak dapat dipaksakan, menurut hukum. Melalui model pendekatan “administrasi” ini, sebagaimana pendekatan “politis”, menurut Bruce Mitchell¹⁹, apabila korupsi muncul, maka keputusan yang diambil tidak dapat dijamin memenuhi kepentingan banyak kelompok atau pihak yang seimbang.

Atas dasar penilaian-penilaian di atas penulis berpendapat bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa lingkungan dengan model mediasi untuk penyelesaian masalah pencemaran sungai yang ditimbulkan oleh Perusahaan Laundry yang terletak di Kelurahan Wonoyoso, Kecamatan Buaran, Kekurangannya adalah terletak pada prosedur/mekanisme ber”mediasi”, karena

¹⁹Bruce Mitchell, “*Resource and Environmental Management*” diterjemahkan dan disadur oleh B. Setiawan dan Dwita Hadi Rahmi “*Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup*” (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2003), 368.

sebagaimana diakuinya sendiri ketentuan Undang-undang No. 32 tahun 2009 yang mengatur tentang Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Pasal 85 ayat 3 tentang Mediator dan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kapolsek Pekalongan menyatakan baru mengetahuinya. Mengenai hal ini penulis dapat mengetahui misi/tugas yang diemban Kapolsek Buaran harus selalu mengetahui keadaan daerah yang dipimpin sehingga masyarakat dapat diciptakannya suasana kondusif dengan mengakomodir kepentingan kedua belah pihak yang sedang berseberangan agar tidak terjadi tindakan anarkis ataupun main hakim sendiri.

Adapun apabila ditinjau dari hasil yang dicapai, penulis berpendapat bahwa “mediasi” yang telah dicoba oleh Kapolsek Buaran adalah rapat yang pertama gagal dalam usaha “menengahi” sengketa, karena dari pihak Perusahaan hanya mewakilkan/utusan sehingga perwakilan /utusan tidak berani mengambil keputusan dalam kesepakatan rapat. “Mediasi” baru dapat dikatakan berhasil apabila permasalahan-permasalahan yang ada dapat *tereliminir* dengan baik sebagaimana dimaksudkan Pasal 84 UU No.32 Th.2009 ayat (1) yaitu bahwa dampak negatif terhadap lingkungan hidup yang pernah terjadi tidak terulang lagi.

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Penerapan UU. No. 32 Tahun 2009 Pasal 85 Tentang Penyelesaian Sengketa lingkungan hidup diluar Peradilan di Kabupaten Pekalongan Dan Solusinya

Berkaitan dengan hasil pembahasan dan analisa data kasus pencemaran Sungai oleh Perusahaan Laundri di Kelurahan Wonoyoso di kabupaten Pekalongan di atas, maka dengan demikian nampak dengan jelas bahwa faktor-faktor yang menyebabkan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dapat dilaksanakan melalui cara mediasi di Kabupaten Pekalongan menurut penulis adalah sebagai berikut :

Adanya undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.²⁰

²⁰Absori : Op. Cit hal. 251

1. Keseriusan dan Perannya Mediator dalam penyelesaian sengketa yang terjadi diwonoyoso
2. Adanya UU No. 32 Th 2009 Pasal 54 ayat (1) Tentang “ Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.”²¹
3. Berfungsinya Pasal 85 UU No. 32 Th. 2009 ayat (3) berbunyi “ Dalam Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar Peradilan dapat digunakan jasa Mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.
4. Dengan diperlakukan UU No.32 Th.2009 Pasal 85 ayat (3) masyarakat merasa punya peran dalam menyelesaikan masalah limbah.Keadaan yang demikianmemberikan kepada masyarakatuntuk semangat mengadakan pembentukan lembaga penyelesaian sengketa di luar peradilan yang bertujuan untuk mengefektifkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara alternatif di luar pengadilan.Meskipun peranannya hanya bersifat alternatif namun adalah menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan atau memfasilitasi terbentuknya lembaga tersebut di tiap-tiap daerah, sehingga apabila pada saatnya masyarakat menghendaki penyelesaian sengketa melalui jalur ini saat itu pula pemerintah sudah dapat memfasilitasinya.Dan keadaan ini pula sebagai resiko pemberlakuan asas subsidiaritas pada penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia.
5. Pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan mulai mengetahui manfaat amanat Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009sebagai pelaksana Pasal 85 ayat (3), “.....
6. Terbukanya pemerintah daerah untuk mendapatkan orang-orang (Sumber Daya Manusia) yang memiliki ketrampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan yang sudah berpengalaman menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

²¹Absori : Op. Cit. hal 250

7. Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dapat mengatasi jalannya Industri mengenai dampak lingkungan Hidup.
8. Turunnya bantuan Pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan berupa Pembangunan Penampungan Limbah dan Mesin Pengurai Limbah adalah salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam menangani lingkungan hidup.
9. Perannya Masyarakat telah diatur dalam Undang-undang No.32 Th. 2009 Pasal 70 ayat (1) tentang "Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup."

PENUTUP

Kesimpulan

Memperhatikan hasil penelitian dan pembuktian dalam kepenulisan tesis ini pada akhirnya penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut, yaitu:

Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui cara "Mediasi" di Kelurahan Wonoyoso Kec. Buaran Kabupaten Pekalongan dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan oleh UU. No. 32 Tahun 2009.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat penulis, berkaitan dengan masalah usaha-usaha kelompok masyarakat yang berjuang menuntut hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat yang terjadi di Kabupaten Pekalongan dalam periode setelah berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, adalah dari kasus yang menonjol yaitu :

Desa Wonoyoso adalah daerah yang banyak bermunculan pengusaha-pengusaha baru terutama yang berhubungan Limbah : Laundry Jeans, Pemutih Kain sampai 54 pengusaha Kasus Pencemaran Limbah Sungai Irigasi Petani, antara Perusahaan Laundry Cucian Jeans melawan masyarakat Wonoyoso dan

Kelurahan Simbangkulon Kec. Buaran Kabupaten Pekalongan yang terjadi pada tahun 2013.

Dari kasus di atas, dapat diketahui bahwa melalui pendekatan Negosiasi untuk diselesaikan melalui cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, khususnya dengan cara “Mediasi”. Hasil penelitian akhir dari masalah di atas tersebut bisa dapat diselesaikan dengan cara mediasi.

Buah dari hasil Mediasi untuk penyelesaian sengketa antara Perusahaan-perusahaan Laundry Jeans diwonoyoso melawan dengan masyarakat Wonoyoso di kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, sampai dengan waktu yang ditentukan tahap awal mengalami kegagalan karena dari salah satu pihak ada yang tidak hadir hanya diwakilkan.

Pada tahap kedua pertemuan mengalami titik terang antara lain memutuskan berupa “ Surat Pernyataan “ yang isinya antara lain dari pihak perusahaan siap untuk memenuhi tuntutan masyarakat wonoyoso. Pertemuan tahap ketiga Pihak Mediator telah berusaha untuk menyediakan lahan IPAL induk karena yang utama bahwa ipal yang dibuat di perusahaan –perusahaan ukurannya kecil tidak memenuhi standar ukuran IPAL. Sehingga Mediator mengusahakan lahan dibantaran sungai. Dilanjutkan pada rapat tahap berikutnya Mediator mempertemukan kembali dari kedua belah pihak yang isi dari pertemuan akan membangun IPAL Induk serta pengadaan Mesin Pengurai Limbah. dari penyelesaiannya melalui mediasi berjalan secara konsekuen dikarenakan banyak yang mempengaruhi dari kedua belah pihak untuk tidak konsekuen. Semuanya telah dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

Faktor - faktor keberhasilan Penerapan UU. No. 32 Tahun 2009 Pasal 85 Tentang Penyelesaian Sengketa lingkungan hidup di luar Peradilan di Kabupaten Pekalongan.

1. Adanya Undang-undang No. 32 Tahun 2009 yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup.
2. Peranan Mediator sangat dominan dalam menangani kasus Penyelesaian sengketa Pencemaran Sungai irigasi diwonoyoso.

3. Adanya UU No.32 Tahun 2009 pasal 84, 85 dan 86 yang mengatur tentang cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Pengadilan maupun diluar pengadilan.
4. Peranan Kapolsek (Mediator) sangat penting dalam pertemuan dengan memberikan solusi agar membentuk Forum, dan atas masukan dari kapolsek akhirnya terbentuklah Forum yang bernama FORUM RUKUN SEJAHTERA dalam kasus pencemaran limbah yang terjadi agar tidak saling lempar Tanggung jawab.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan telah melakukan langkah-langkah kongkrit dalam menangani limbah sesuai pasal 45 ayat 2 UU No. 32 tahun 2009. berbunyi “ Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dengan mendirikan lembaga Penyedia Jasa atau pendampingan masyarakat guna untuk menangani kasus-kasus limbah yang banyak terjadi di kabupaten Pekalongan.
7. Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan telah terbantu adanya UU Pasal 86 (1) No, 32 Th.2009 dapat merekrut tenaga-tenaga professional dalam bidang lingkungan hidup. Sehingga kasus limbah yang terjadi di Kabupaten Pekalongan bisa tertangani lebih cepat.

Saran

Pertama Kepada Pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan seharusnya melakukan sosialisasi Undang-undang No.32 tahun 2009 secara continue (terus menerus) terhadap masyarakat Pekalongan

Kedua Kepada pihak Perusahaan hendaknya tidak bersikap pasif dalam penanganan limbah

Ketiga Kepada Mediator mempunyai peranan penting dalam penyelesaian kasus limbah, sehingga hendaknya harus lebih aktif dan responsif.

Perlunya adanya pelatihan dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani permasalahan sengketa limbah.

Keempat Kepada Perusahaan harus beritikad baik terhadap lingkungan, dan ekologi. Bisa berupa membangun IPAL sesuai ketentuan, dan bersedia memberi ganti rugi terhadap warga.

Bagi masyarakat, untuk tidak segan menuntut haknya, melalui prosedur dan ketentuan perundang- undangan.

Kelima Kepada Pemerintah daerah harus mensosialisasikan Undang-undang yang berhubungan dengan lingkungan pasal 85 ayat 3 yang berbunyi “ Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Keenam Kepada Pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan harus memberikan kesadaran kepada para pihak terutama perusahaan – perusahaan yang ada di Kabupaten Pekalongan tentang pentingnya pengelolaan limbah.

Ketujuh Kepada Pihak Perusahaan harus beritikad baik terhadap lingkungan, dan ekologi. Bisa berupa membangun IPAL sesuai ketentuan, dan bersedia memberi ganti rugi terhadap warga.

Kedelapan Kepada Pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan seharusnya memperketat perizinan terhadap perusahaan-perusahaan yang menimbulkan Limbah terutama limbah yang berbahaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrahman. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Bandung: Alumni, 1983.
- Adi Rianto. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Bahan Kuliah, 2003.
- Ali Achmad. *Menguak Tabir Hukum Jakarta (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Gunung Agung, 2002.
- Ashshofa Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Bruce Mitchel. B. Setiawan & Dwita Hadi Rahmi. *Pengelolaan Sumberdaya Dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Danusaputro Munadjat. *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*. Bandung: Binacipta, 1980.
- Danusaputro Munadjat. *Hukum Lingkungan Buku II: Umum*. Bandung: Binacipta, 1980.
- Fuady Munir. *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Goodpaster Gary. *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*. Jakarta: ELIPS Project, 1993.
- Harahap M, Yahya. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Hardjasoemnatri Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Margono Suyud. *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Mertokusumo Sudikno. *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan di Indonesia sejak 1942, Dan apakah Kemanfaatannya bagi Kita Bangsa Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung, 1985.
- Moore, Christopher W. *Mediasi Lingkungan*. Jakarta: Indonesian Centre for Environmental Law dan CDR Associates, 1985.
- Muchsin & Fadillah Putra. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Malang: Averroes Press, 2002.
- Rahardjo Satjipto. *Beberapa Pemikiran tentang Ancangan Antar Disiplin dalam Pembaharuan Hukum Nasional*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Rahardjo Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1982.

- Santosa Mas Achmad dan Anthony LP. Hutapea. *Mendayagunakan Mekanisme Alternatif Sengketa Lingkungan (MAPS) di Indonesia*. Jakarta: WALHI, 1992.
- Santosa Mas Achmad. *Pelebagaan Alternative Dispute Resolution (ADR) di Beberapa Negara*. Jakarta: Majalah Musyawarah Nomor 1 tahun 1, 1997.
- Silalahi Daud. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni, 1992.
- Soegianto Apriliani. *Bibliografi Beranotasi tentang Lingkungan laut dan Pencemaran Laut*. Jakarta: Lembaga Oceanologi Nasional, 1976.
- Soekanto Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali, 1985.
- Soekanto Soerjono. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali, 1980.
- Soemartono P. Gatot. *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Soemarwoto Otto. *Analisa Dampak Lingkungan Proyek PLTA Saguling PSL*. Bogor: IPB, 1981.
- Soemarwoto Otto. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan, 2001.
- Soemarwoto Otto. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan, 2001.
- Soemitro Ronny Hanitijo. *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Soerianegara. *Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Bogor: Fakultas Pasca Sarjana IPB, 1979.
- Soeryani Mohamed. *Dasar-dasar Ekologi, makalah pada kursus AMDAL*. Jakarta: UI, 1982.
- Sudarwanto Al Sentot. *Kebijakan Menteri Lingkungan Hidup tentang Audit LH*. Semarang: Lembaga Pengembangan Ilmu Hukum Dan Manajemen IBLAM, 2000.
- Sudarwanto Al Sentot. *Penerapan PP. No.27 Tahun 1999 tentang AMDAL berkaitan dengan Otonomi Daerah*. Semarang: Lembaga Pengembangan Ilmu Hukum IBLAM, 2000.

Usman Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Wijoyo Suparto. *Penyelesaian Sengketa Menurut UUPLH*. Jakarta: Jurnal Hukum Lingkungan, 1999.

Jurnal

Absori : “Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (*Sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif*) Hal. 241.,2009)

Bruce Mitchell,”*Resource and Environmental Management*” diterjemahkan dan disadur oleh B. Setiawan dan Dwita Hadi Rahmi “*Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup*” (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), 368

George Martin, Montclair State University - Department of Sociology. December 18, 2012

George Martin, Montclair State University - Department of Sociology December 18, 2012

Montclair State University - Department of Earth and Environmental Studies Michael P. Weinstein, Montclair State University - PSEG Institute for Sustainability Studies

OIDA International Journal of Pembangunan Berkelanjutan, Vol. 3, No 8, hlm 101-106, 2012 The Role of Water, Food Security and Poverty Alleviation in the Context of Sustainable Livelihoods

OIDA International Journal of Sustainable Development, Vol. 5, No. 6, pp. 70-80, 2012.

OIDA International Journal of Sustainable Development, Vol. 5, No. 6, pp. 70-80, 2012 System Dynamic Model Approach for Urban Watershed Sustainability Study

The IUP Journal of Infrastructure, Vol. IX, No. 2, pp. 34-43, June 2011. The Global Water Crisis: Issues and Solutions Manzoor Kooloth Peedikayil Jr.